



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH BANTEN**



**RENCANA STRATEGIS**  
**KANTOR WILAYAH BANTEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020 - 2024**

**RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA BANTEN  
TAHUN 2020 – 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai instansi vertikal Kantor Wilayah Banten mengemban tugas dibidang hukum dan HAM dengan membangun hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian, untuk mendukung terwujudnya visi, dan pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dalam RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia tahun 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024). Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi acuan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah terarah dan sejalan dengan Resnra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, maka diperlukan dokumen perencanaan strategis sebagai pedoman yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan kerangka pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Tahun 2020-2024

## **B. KONDISI UMUM**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan.
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan di bantu oleh 4 (empat) orang Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mewujudkan hal tersebut melalui empat bidang tugas utama yang menjadi tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas fungsi yang merupakan peran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia. Pencapaian tersebut akan berhasil diwujudkan jika kita senantiasa memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di segala bidang, karena prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini memiliki beberapa karakteristik yakni: *partisipatif, rule of law*, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten terdiri dari 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis antara lain :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kls I Tangerang
2. Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Pemuda
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kls I Tangerang
4. Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Perempuan
5. Lembaga Pemasyarakatan Kls IIB Anak Wanita
6. Lembaga Pemasyarakatan Kls III Cilegon
7. Lembaga Pemasyarakatan Kls II Serang
8. Rumah Tahanan Negara Kls I Tangerang
9. Rumah Tahanan Negara Kls IIB Serang

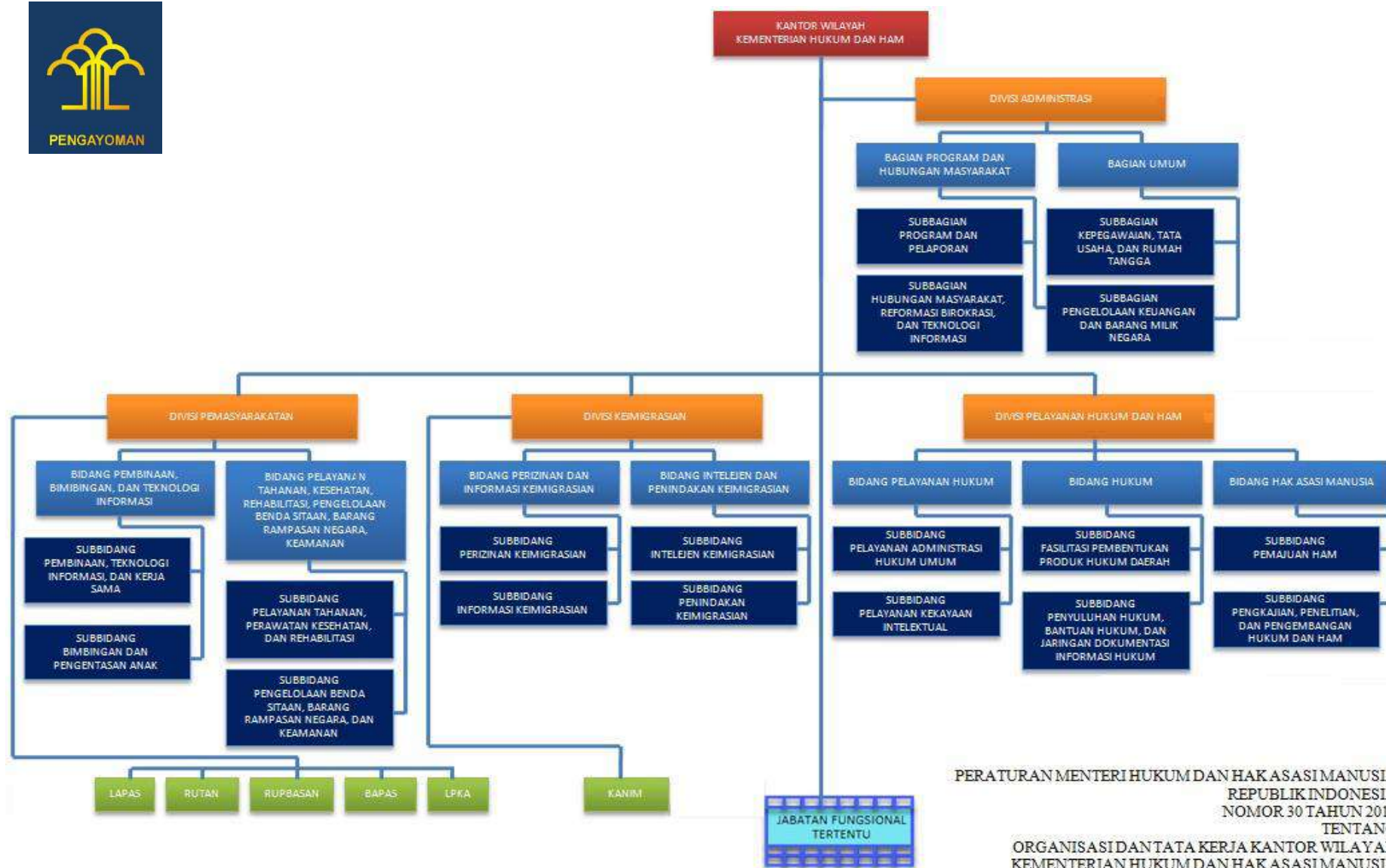
10. Rumah Tahanan Negara Kls IIB Rangkasbitung
11. Rumah Tahanan Negara Kls IIB Pandeglang
12. Balai Pemasarakatan Kls II Serang
13. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kls I Serang
14. Kantor Imigrasi Kls I Tangerang
15. Kantor Imigrasi Kls II TPI Cilegon
16. Kantor Imigrasi Kls I Serang
17. Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang
18. Lembaga Pemasarakatan Terbuka Ciangir
19. Balai Pemasarakatan Ciangir

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 (Renstra 2015-2019) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Banten berusaha mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM antara lain :

1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Banten.
2. Pelayanan administrasi jasa hukum di Wilayah Banten.
3. Pemajuan HAM di Wilayah Banten.
4. Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas baik di Wilayah Banten.
5. Fasilitasi Pembentukan produk hukum daerah.
6. Pembinaan dan pembangunan hukum serta peningkatan bantuan hukum dan kesadaran hukum di Wilayah Banten.
7. Melaksanakan kajian hukum di Wilayah.
8. Meningkatnya pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian di Wilayah.
9. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemasarakatan.

Sebagai lembaga negara yang masing-masing unit eselon I nya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda atau heterogen, maka diperlukan suatu kesatuan komitmen dan dokumen perencanaan strategis yang mampu mengawal kebijakan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuju sasaran dan cita-cita pembangunan yakni terwujudnya masyarakat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil , makmur, dan sejahtera.

## STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN



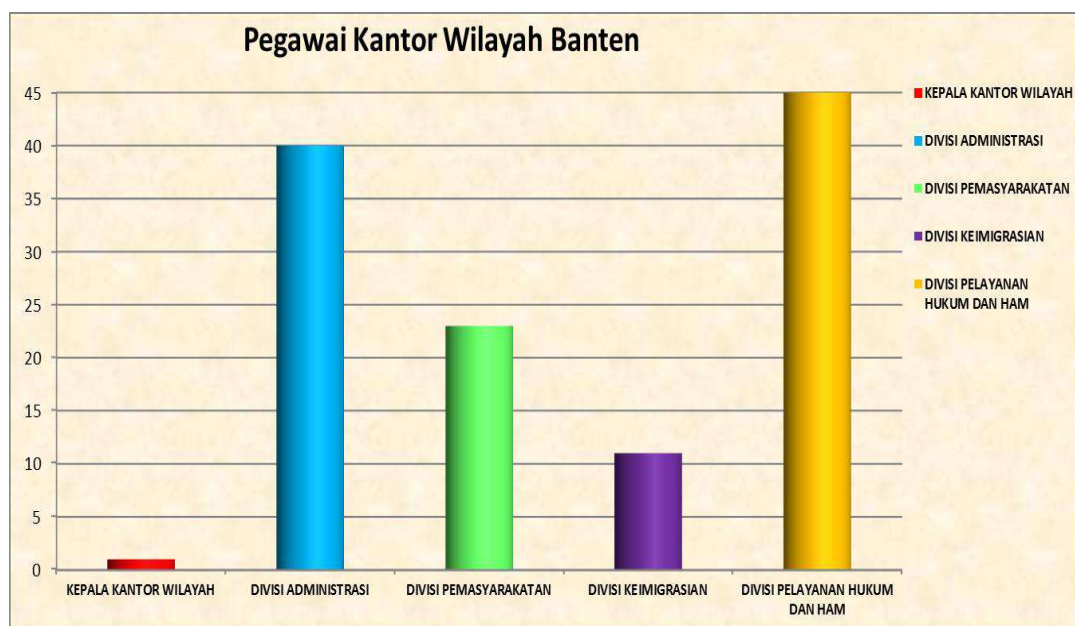
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 30 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dukungan 19 satuan kerja yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/kota, serta sumber daya manusia sebanyak 1637 (Seribu Enam Ratus Tiga puluh Tujuh) Aparatur Sipil Negara terdiri dari Laki-laki 1.168 orang dan Perempuan 409 orang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten melaksanakan mandat yang strategis tersebut secara jelas dan terukur, guna mewujudkan visi misi Kementerian.

Pencapaian strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu 2015-2019 ditandai dengan hasil-hasil kinerja yang terukur antara lain :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten memiliki kekuatan SDM dengan jumlah 120 pegawai yang tersebar pada 4 Divisi, seperti yang digambarkan pada diagram berikut :



Dalam menjalankan fungsi pembinaan kepada 19 (sembilan belas) satuan kerja di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten khususnya pengembangan Sumber Daya Manusia baik di kantor wilayah maupun di 16 satuan kerja pemasyarakatan dan 3 satuan kerja keimigrasian selama kurun waktu 2015-2019



Capaian peningkatan dan penguatan tugas fungsi kepada 1.653 Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Pegawai Yang Mengikuti Diklat  
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Seluruh Pegawai	Pegawai Yang Mengikuti Diklat	%
1	2015	1.271	116	<b>9,13%</b>
2	2016	1.244	86	<b>6,91%</b>
3	2017	1.190	137	<b>11,51%</b>
4	2018	1.612	473	<b>29,34%</b>
5	2019	1.653	632	<b>38,23%</b>

Rekapitulasi Pegawai Yang Mengikuti Ujian Penyesuaian Ijasah  
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Pegawai Yang Mengikuti Ujian Penyesuaian Ijasah
1	2015	122
2	2016	42
3	2017	0
4	2018	20
5	2019	11

2. Pembentukan Hukum

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten yang sudah dilakukan pengharmonisasian untuk kurun waktu tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

No	Jenis	2015	2016	2017	2018	2019
1.	<b>Peraturan Daerah</b>					

	Provinsi Banten	4	5	13	8	7
	Kota Serang	8	8	13	6	9
	Kota Cilegon	2	8	16	7	6
	Kota Tangerang	-	2	15	6	1
	Kota Tangerang Selatan	12	10	12	16	16
	Kabupaten Serang	4	8	11	3	8
	Kabupaten Tangerang	12	15	21	19	15
	Kabupaten Pandeglang	-	-	-	2	6
	Kabupaten Lebak	-	8	7	6	1
	<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>64</b>	<b>108</b>	<b>73</b>	<b>69</b>
<b>2.</b>	<b>Peraturan Kepala Daerah</b>					
	Provinsi Banten	2	-	12	12	6
	Kota Serang	-	-	-	-	-
	Kota Cilegon	-	-	-	-	-
	Kota Tangerang	-	1	-	-	8
	Kota Tangerang Selatan	59	31	42	42	66
	Kabupaten Serang	4	-	-	-	1
	Kabupaten Tangerang	-	-	-	1	-
	Kabupaten Pandeglang	-	-	-	-	-
	Kabupaten Lebak	-	-	1	-	-
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>32</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>81</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>96</b>	<b>163</b>	<b>128</b>	<b>150</b>

### 3. Pelayanan Hukum

Keberagaman jenis layanan hukum yang diberikan antara lain dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, serta layanan kepada napi/tahanan, penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan capaian kinerja selama kurun waktu 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :

#### a. Pelayanan Fidusia secara *On Line*

Penyelesaian pelayanan Fidusia secara *online* meliputi pendaftaran, perubahan, penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia sebanyak 436.770 pada tahun 2015, 518.411 pada tahun 2016, 572.202 pada tahun 2017, 565.638 pada tahun

2018, dan 635.745 pada tahun 2019.

#### Penyelesaian Pelayanan Fidusia Tahun 2015-2019

Tahun	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia (Roya)
2015	428.716	507	7.547
2016	507.080	536	10.795
2017	530.972	131	41.099
2018	515.942	369	49.327
2019	539.311	-	96.434

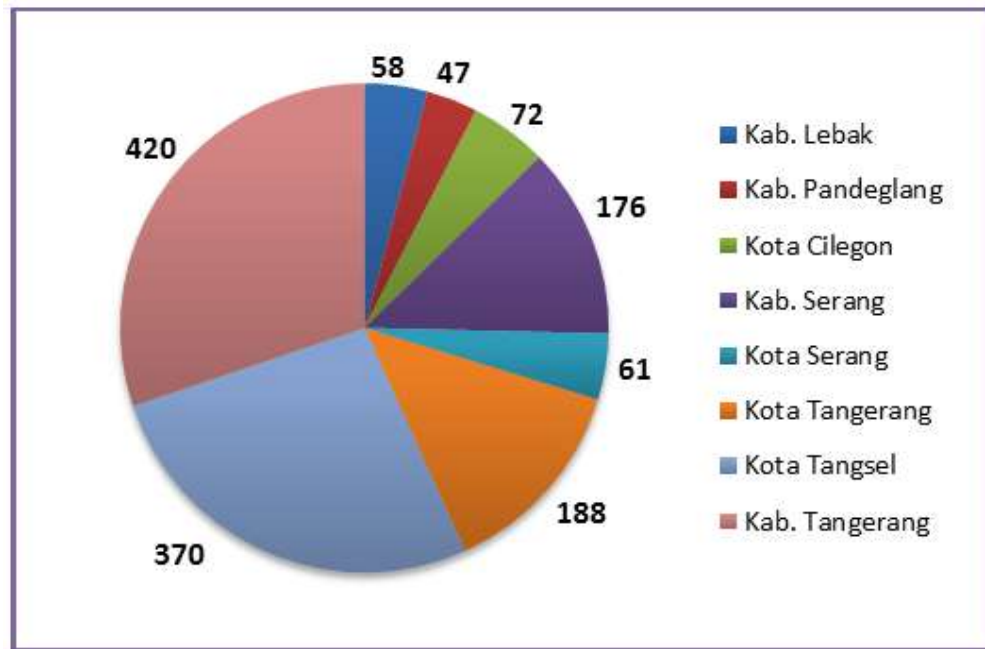
b. Pelayanan Jasa Hukum layanan Kenotariatan.

Pemberian layanan kenotariatan meliputi sumpah dan pelantikan notaris baru, notaris pindahan, dan notaris pengganti, pembinaan dan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah serta Majelis Kehormatan Notaris Wilayah selama kurun waktu 2015 – 2019. Provinsi Banten secara administratif terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak.

Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Jumlah notaris di Provinsi Banten sampai dengan Desember tahun 2019 adalah sebanyak 1.392 orang, dengan rincian:

- Kabupaten Lebak : 58 orang
- Kabupaten Pandeglang : 47 orang
- Kota Cilegon : 72 orang
- Kabupaten Serang : 176 orang
- Kota Serang : 61 orang
- Kota Tangerang : 188 orang
- Kota Tangerang Selatan : 370 orang
- Kabupaten Tangerang : 420 orang

**KOMPOSISI JUMLAH NOTARIS BANTEN  
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019**



**JUMLAH NOTARIS BANTEN  
TAHUN 2015 – 2019**

Kab/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Lebak	18	34	45	55	58
Kab. Pandeglang	24	25	38	44	47
Kota Cilegon	15	27	53	60	72
Kab. Serang	112	122	156	167	176
Kota Serang	37	43	57	57	61
Kota Tangerang	152	188	188	188	188
Kota Tangerang Selatan	322	370	370	370	370
Kab. Tangerang	364	420	420	420	420
<b>Jumlah</b>	<b>1.044</b>	<b>1.229</b>	<b>1.327</b>	<b>1.361</b>	<b>1.392</b>

- c. Pelayanan permohonan Kekayaan Intelektual sebagaimana terlihat dalam tabel dan grafik berikut:

Realisasi Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual  
Tahun 2015-2019

JENIS PERMOHONAN	2015	2016	2017	2018	2019
Hak Cipta	24	31	19	95	79
Paten	2	7	6	35	16
Merk	-	-	-	-	1
Desain Industri	-	-	-	-	-
Indikasi Geografis	-	-	-	-	1

- d. Pemberian Bantuan Hukum

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah dilakukan pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu / miskin di wilayah Provinsi Banten. Adapun jumlah pemberian bantuan hukum melalui penyelesaian litigasi dan penyelesaian non litigasi dari Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

No	Jenis	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Litigasi	230	758	613	149	566
2.	Non Litigasi	35	62	63	102	99
<b>Jumlah</b>		<b>265</b>	<b>820</b>	<b>676</b>	<b>251</b>	<b>665</b>

- e. Pelayanan Keimigrasian

Pelayanan Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2015 - 2019

JENIS PELAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran Paspor RI 48 Hal.	79.585	109.633	114.302	123.223	174.260
Pengeluaran Paspor RI 24 Hal.	1.961	1.022	1.183	1.719	1.353
Pemberian/	4.641	8.558	5.176	6.737	7.441

Perpanjangan ITK					
Pemberian/ Perpanjangan KITAS	13.845	13.652	12.701	13.591	10.718
Pemberian/ Perpanjangan KITAP	56	217	89	154	109
Pengeluaran SKIM	21	14	21	19	25

- 1) Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) Kanim Tangerang berlokasi di Serpong Tangerang untuk mewujudkan pelayanan prima dalam penerbitan paspor guna pendekatan pelayanan dan peningkatan kepuasan publik.
- 2) Penerapan *e-passport* untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanan paspor yang disesuaikan dengan rekomendasi oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO).
- 3) Penerapan pelayanan sistem penerbitan paspor *one stop service*/Sistem Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT) 3 (Tiga) Kantor Imigrasi.
- 4) Pelaksanaan pelayanan permohonan paspor melalui aplikasi APAPO (Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online)
- 5) Pelayanan Paspor Simpatik melalui Gerai Paspor di Tangerang City Mall yang mulai beroperasi pada tanggal 26 Oktober 2019, melayani permohonan paspor setiap hari Sabtu dan Minggu
- 6) Pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kls I Non TPI Tangerang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenpanRB.
- 7) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Imigrasi Kls I Non TPI Serang dengan Pemerintah Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Serang melaksanakan pelayanan paspor secara simpatik berupa *Mobile Unit Paspor*.
- 8) Pelayanan Publik pada Kantor Imigrasi Kls II TPI Cilegon

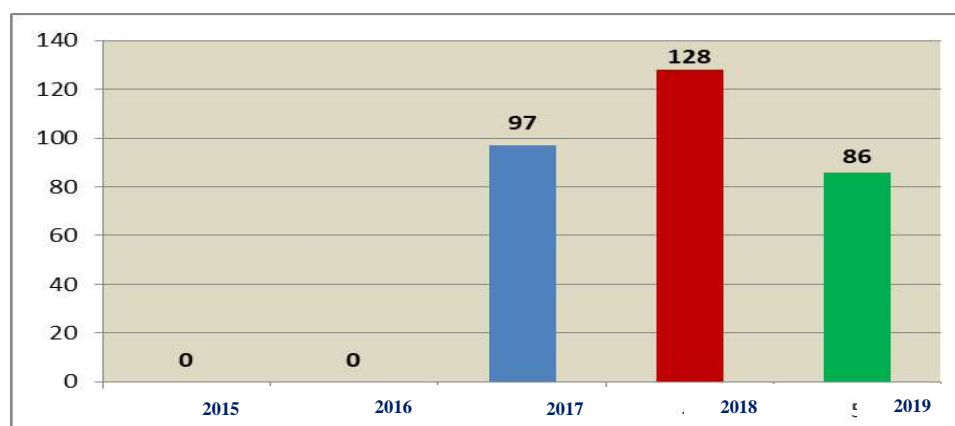
Mendapatkan predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik dari Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Propinsi Banten.

- 9) Penerapan layanan kunjungan berbasis IT yang terintegrasi dengan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) pada Lapas/Rutan.
- 10) Sistem Aplikasi Pembebasan Bersyarat secara online untuk menyeragamkan metode pengusulan Pembebasan Bersyarat di semua UPT Pemasarakatan, Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia serta di Ditjen Pemasarakatan.
- 11) Penyajian data jumlah penghuni, anggaran Bama, SDM petugas secara online dan real time serta dapat diakses oleh masyarakat.

f. Penegakan Hukum

Dalam rangka peningkatan penegakan hukum khususnya dibidang Administrasi Hukum Umum, pemasarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelelektual, maka selama kurun waktu 2015 – 2019 kinerja yang telah dicapai, antara lain:

- 1) Jumlah permohonan pemeriksaan notaris dari kepolisian / kejaksaan / pengadilan yang diterima oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :



- 2) Penyebaran informasi di bidang Kekayaan Intelektual dalam bentuk pemberian sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di antaranya kalangan perguruan tinggi, para pelaku Usaha Kecil dan Menengah, serta masyarakat secara umum.
- 3) Penetapan Kawasan Berbudaya Kekayaan Intelektual kepada kawasan, wilayah dengan kriteria tertentu serta yang dianggap mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap kemajuan sistem Kekayaan Intelektual.
- 4) Penegakan Hukum Keimigrasian

JENIS PENEKAKAN HUKUM	2015	2016	2017	2018	2019
Tindakan Administrasi Keimigrasian	106	121	163	141	292
Penyidikan	-	2	1	-	1

- 5) Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kantor Imigrasi.
- 6) Pelaksanaan Proses penyidikan tindak pidana keimigrasian di seluruh Kantor Imigrasi.
- 7) Melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- 8) Pelaksanaan pengawasan Orang Asing melalui Aplikasi APOA (*aplikasi pelaporan orang asing*)
- 9) Program *Getting to Zero* handphone, pungutan liar, dan narkoba (Halinar) di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.
- 10) Program Penguatan Pengawasan Internal Pemasyarakatan dan Penegakan Kode Etik.
- 11) Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang



Sistem Peradilan Pidana Anak pada Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan.

12) Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal Restoratif *Justice*.

g. Pemajuan Hak Asasi Manusia

Capaian kinerja bidang pemajuan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu 2010 – 2014 antara lain :

1. Pelayanan Komunikasi Masyarakat ini memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang merasa terlanggar Hak Asasi Manusia-nya melalui telaahan permasalahan yang dihadapi baik secara langsung maupun melalui *focus group discussion (FGD)*. Hasil telaahan permasalahan yang ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia untuk dilakukan klarifikasi dan mendorong penyelesaiannya.
2. Pengumpulan dan pengolahan data implementasi Hak Asasi Manusia dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta kondisi perkembangan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Banten. Informasi Hak Asasi Manusia ini dipublikasikan baik melalui media cetak, media elektronik dan website Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dengan laman : [www.HakAsasiManusia.go.id](http://www.HakAsasiManusia.go.id).
3. Pelayanan kepada apatur pemerintah dan masyarakat dengan memberikan/meningkatkan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai Hak Asasi Manusia melalui kegiatan Diseminasi Hak Asasi Manusia dan Penguatan Hak Asasi Manusia. Aparatur pemerintah dapat menyusun kebijakan dan regulasi bernuansa Hak Asasi Manusia dan masyarakat mengerti hak dan kewajiban dalam bermasyarakat dan bernegara.

4. Memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/kota untuk diusulkan dan mendapatkan penghargaan Kabupten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
5. Kegiatan berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

<b>Kegiatan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
P2HAM	-	-	-	2 UPT	5 UPT
KKP	-	1 Kab/Kota	5 Kab/Kota	8 Kab/Kota	6 Kab/kota
YANKOMAS	1 Kasus	8 Kasus	2 Kasus	4 Kasus	7 Kasus

### **C. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

#### **1. Potensi**

Perkembangan perekonomian global saat ini tentunya memberikan dampak meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya jaminan kepastian hukum, khususnya menyangkut keberadaan alat bukti untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban individu ataupun badan hukum. Kebutuhan masyarakat inilah yang merupakan salah satu alasan berkembangnya jabatan notaris. Masyarakat tentu saja mempunyai harapan agar pelayanan hukum yang diberikan oleh notaris dapat benar-benar menjamin kepastian hukum serta memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kebutuhan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian

hukum dalam berbagai hubungan, baik nasional, regional maupun internasional. Kebutuhan akan akta otentik ini dalam prakteknya tidak terlepas dari berbagai kendala konvensional yang harus dihadapi notaris. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan adanya kendala-kendala yang membuka ruang bagi timbulnya berbagai resiko hukum. Prinsip negara hukum menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam menjalankan profesinya untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat, notaris perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Kegiatan yang dilakukan berupa penyebaran informasi di bidang kekayaan intelektual dalam bentuk sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di antaranya kalangan perguruan tinggi, para pelaku Usaha Kecil dan Menengah, serta masyarakat secara umum berdampak pada peningkatan pemahaman terhadap perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Adanya peningkatan pemahaman para pelaku usaha seperti UMKM dan masyarakat tentang kekayaan intelektual tercatat dengan semakin meningkatnya prosentase pendaftaran kekayaan intelektual, seperti merek, hak cipta dan desain industri di wilayah Provinsi Banten.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang hukum telah berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah kabupaten / kota se-Provinsi Banten. Untuk melaksanakan tugas bidang hukum saat ini memiliki 7 (tujuh) orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan 5 (lima) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, serta 7 orang Penyuluh Hukum. Seluruh kegiatan yang meliputi pelayanan komunikasi masyarakat, pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari upaya dalam menjamin terselenggaranya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia di daerah.

## 2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten selama tahun 2019, terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian tujuan organisasi antara lain :

- Potensi gratifikasi pada proses kenaikan pangkat pegawai.
- Potensi Gratifikasi OBH pada pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana bantuan hukum.
- Penyimpangan Proses pendaftaran online paspor yang dibantu petugas.
- Penyimpangan dalam proses pelaksanaan Sidang TPP di Kantor Wilayah.
- Kurang aktifnya kontributor berita dari perwakilan UPT dan divisi dalam menyampaikan dokumentasi dan berita kepada Humas Kanwil Banten.
- Rendahnya permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kanwil Banten.
- Kurang efektifnya pengelolaan dan pemanfaatan BMN di Kanwil Banten.
- Kurang harmonisnya perancangan Peraturan Daerah dengan Pemda Prov/Kab/Kota dan Sekretariat DPRD di wilayah Banten.
- Kurang optimalnya pelaksanaan program Kab/Kota Peduli HAM.
- Belum optimalnya pengawasan terhadap Orang Asing di wilayah Banten.
- Beberapa notaris telah hadir memenuhi panggilan penyidik padahal belum mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten. Notaris-notaris tersebut menyampaikan alasannya bahwa mereka ingin kooperatif dengan pihak penyidik. Tindakan notaris ini tidak tepat dan tidak prosedural, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

- Surat undangan yang diterima tenaga perancang perundang-undangan sering disampaikan secara mendadak, sehingga kesiapan para perancang dalam membahas / mengharmonisasikan rancangan produk hukum daerah kurang maksimal;
- Masih kurangnya penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.
- Kurangnya dukungan anggaran dalam melaksanakan pengharmonisasian dan penyuluhan hukum;
- Kurangnya dukungan sarana prasarana dalam melaksanakan pengharmonisasian dan Penyuluhan Hukum;
- Belum semua unit pelaksana teknis memperoleh penghargaan pelayanan Publik berbasis hak asasi manusia;
- Penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia sampai dengan saat ini dilakukan dengan melakukan rapat Audiensi bersama para pihak dan instansi terkait. Namun dalam beberapa permasalahan diperlukan adanya tenaga mediator.
- Dalam hal penilaian Kabupaten/kota peduli hak asasi manusia masih ada kabupaten/kota yang tidak menyampaikan data secara lengkap.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### A. VISI DAN MISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

#### **1. VISI Kementerian Hukum dan HAM**

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

#### **2. MISI Kementerian Hukum dan HAM**

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

##### **Misi ke-6 :**

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

##### **Misi ke-7 :**

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

**Misi ke-8 :**

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Berdasarkan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut maka ditetapkan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut

**1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

**2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara



prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

### **3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang masyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja

dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

- Di bidang administrasi hukum umum

#### **4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**

Alternatif:

Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

#### **5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.**

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui

pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

**6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**

**7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemyarakatan.**

## **B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

### **1. Tujuan**

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

- a. Misi 1: **Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**, bertujuan untuk:
  - Alternatif 1 Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan
  - Alternatif 2 Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis, Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- b. Misi 2: **Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas**, bertujuan untuk:
  - Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
- c. Misi 3: **Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya**, bertujuan untuk:
  - Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual
  - Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
  - Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
  - Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
- d. Misi 4: **Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**, bertujuan

untuk:

- Terlindunginya hak asasi manusia.

- e. Misi 5: **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan**, bertujuan

untuk:

- Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten
- Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

- f. Misi 6: **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**, bertujuan untuk:

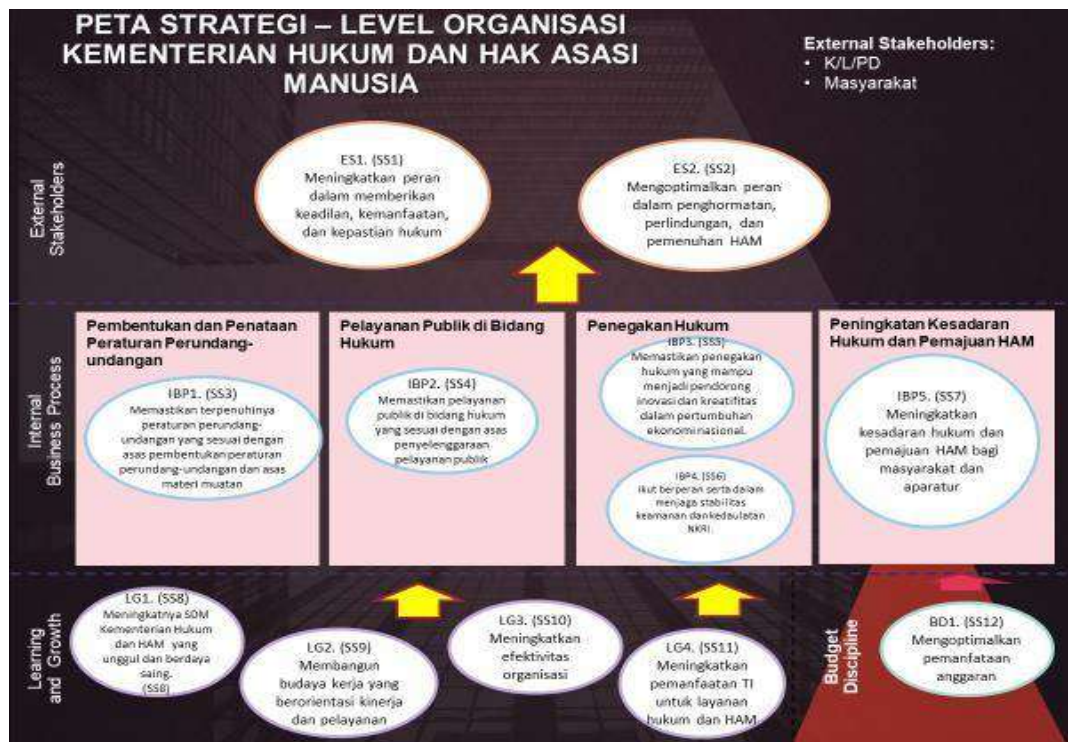
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

- g. Misi 7: **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan**, bertujuan untuk:

- Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
- Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan

## **2. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline*.



Gambar 2.1

### Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

No	Pelaksanaan Misi Pres/Wapres	Tujuan	Sasaran Strategis
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teraratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1)</li> <li>memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)</li> </ul>

No	Pelaksanaan Misi Pres/Wapres	Tujuan	Sasaran Strategis
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5)</li> <li>• ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)</li> </ul>
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2)</li> <li>• meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparaturnya (SS7)</li> </ul>
5.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8)</li> <li>• membangun budaya kerja yang berorientasi</li> </ul>

No	Pelaksanaan Misi Pres/Wapres	Tujuan	Sasaran Strategis
		dapat bersinergi secara konstruktif	kinerja dan pelayanan (SS9) <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan efektivitas organisasi (SS10)</li> <li>• meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11)</li> <li>• mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)</li> </ul>

Tabel 2.1

Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

### 3. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali **“PASTI”** sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip- prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

**PASTI** adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari



masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insitusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses

atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

#### 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

**TABEL 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDRAL**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<b>SEKRETARIS JENDERAL</b>	
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	2. Nilai Reformasi Birokrasi
	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
<b>KEPALA BIRO PERENCANAAN</b>	
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART).
	2. Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi
<b>KEPALA BIRO KEUANGAN</b>	
Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	1. Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
	2. Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93
<b>KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN</b>	
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement
<b>KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA</b>	
Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
<b>KEPALA BIRO UMUM</b>	
Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham	1. persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan
	2. Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal
<b>KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN KERJA SAMA</b>	
Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media

	2. Persentase publikasi Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi
<b>KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (PUSDATIN)</b>	
1. Nilai SPBE meningkat	Peningkatan nilai evaluasi SPBE
2. Tingkat kepuasan pengguna layanan Teknologi Informasi meningkat.	Indeks kepuasan pengguna layanan Teknologi Informasi
3. Data seluruh Unit kerja terintegrasi	Persentase unit kerja yang datanya terintegrasi pada datawarehouse kementerian
4. Seluruh satker menerapkan Teknologi Informasi sesuai standar	Persentase satuan kerja yang menerapkan Teknologi Informasi sesuai standar
<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>	
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
<b>KEPALA DIVISI ADMINISTRASI</b>	
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
<b>KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	

Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi
Meningkatna citra positif Kementerian Hukum dan HAM di wilayah	Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di media
	Persentase berita yang dipublikasikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi
<b>KEPALA BAGIAN UMUM</b>	
Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Evaluasi Kepatuhan Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtangaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

TABEL 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

SASARAN STRATEGIS KEMENKUMHAM	SASARAN PROGRAM PEMASYARAKATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<b>Memastikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik</b>	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan
<b>Memastikan Penegakan Hukum yang Mampu menjadi Pendorong Inovasi dan kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional</b>	Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil dan bersertifikat
<b>Ikut Berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI</b>	Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis
<b>Meningkatkan kesadaran hukum dan Pemajuan HAM bagi masyarakat dan aparatur</b>	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan

TABEL 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian
	Menurunnya persepsi korupsi dalam pelaksanaan tugas keimigrasian	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Banten	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Banten
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Banten
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Banten

TABEL 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI

HUKUM UMUM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>		
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Jumlah PNBP tahun berjalan dikurangi jumlah PNBP tahun sebelumnya dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya dikali 100%

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang diterima dikali 100%
Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Jumlah permohonan layanan yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan yang diterima dikali 100%
<b>KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>		
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Jumlah PNBP tahun berjalan dikurangi jumlah PNBP tahun sebelumnya dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya dikali 100%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang diterima dikali 100%
Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Jumlah permohonan layanan yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan yang diterima dikali 100%
<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM</b>		
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Jumlah PNBP tahun berjalan dikurangi jumlah PNBP tahun sebelumnya dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya dikali 100%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang diterima dikali 100%
<b>KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM</b>		
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Jumlah PNBP tahun berjalan dikurangi jumlah PNBP tahun sebelumnya dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya dikali 100%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang diterima dikali 100%



**TABEL 5. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BADAN  
PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL**

<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>
<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>		
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dalam perkara perdata, pidana dan TUN
	2. Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin berupa penyuluhan, konsultasi, investigasi, penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum
	4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Jumlah penyuluhan hukum di kantor wilayah
	5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Jumlah perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum di kantor wilayah
	6. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum
<b>KEPALA BIDANG HUKUM</b>		
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dalam perkara perdata, pidana dan TUN
	2. Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin berupa penyuluhan, konsultasi, investigasi, penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen

		hukum
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum
	4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Jumlah penyuluhan hukum di kantor wilayah
	5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Jumlah perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum di kantor wilayah
	6. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum
<b>KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH</b>		
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	1. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Jumlah perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum di kantor wilayah
<b>KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, DAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM</b>		
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dalam perkara perdata, pidana dan TUN
	2. Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin berupa penyuluhan, konsultasi, investigasi, penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum
	4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Jumlah penyuluhan hukum di kantor wilayah
	5. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum

TABEL 6. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN

## PERUNDANG-UNDANGAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>		
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	jumlah raperda yang selesai diharmonisasikan/jumlah permohonan harmonisasi raperda x 100%
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan
<b>KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>		
pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah	persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	jumlah raperda yang selesai diharmonisasikan/jumlah permohonan harmonisasi raperda x 100%
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan
<b>KEPALA BIDANG HUKUM</b>		
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah	persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	jumlah raperda yang selesai diharmonisasikan/jumlah permohonan harmonisasi raperda x 100%
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan
<b>KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM</b>		
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah	persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	jumlah raperda yang selesai diharmonisasikan/jumlah permohonan harmonisasi raperda x 100%
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan

TABEL 7. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN

INTELEKTUAL

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>		
1. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah pemetaan potensi penerimaan permohonan kekayaan intelektual pada provinsi	jumlah : Perhitungan berdasarkan jumlah permohonan kekayaan intelektual yang difasilitasi teradministrasi melalui online pada Provinsi tersebut.
	2. jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan diseminasi/promosi terkait kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM
2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	1. jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM
<b>KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>		
1. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah pemetaan potensi penerimaan permohonan kekayaan intelektual pada provinsi	jumlah : Perhitungan berdasarkan jumlah permohonan kekayaan intelektual yang difasilitasi teradministrasi melalui online pada Provinsi tersebut.
	2. jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan diseminasi/promosi terkait kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM
2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	1. jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM

<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM</b>		
1. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah pemetaan potensi penerimaan permohonan kekayaan intelektual pada provinsi	jumlah : Perhitungan berdasarkan jumlah permohonan kekayaan intelektual yang difasilitasi teradministrasi melalui online pada Provinsi tersebut.
	2. jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan diseminasi/promosi terkait kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM
2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	1. jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM
<b>KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>		
1. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah pemetaan potensi penerimaan permohonan kekayaan intelektual pada provinsi	jumlah : Perhitungan berdasarkan jumlah permohonan kekayaan intelektual yang difasilitasi teradministrasi melalui online pada Provinsi tersebut.
	2. jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan diseminasi/promosi terkait kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM
2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	1. jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM

TABEL 8. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI

MANUSIA

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>		
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Perhitungan berdasarkan jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
	jumlah kab/kota peduli HAM	Perhitungan berdasarkan jumlah kab/kota peduli HAM
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Perhitungan berdasarkan Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Perhitungan berdasarkan Jumlah Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

TABEL 9. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BALITBANG

HUKUM DAN HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>		
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Perhitungan berdasarkan jumlah Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA**  
**REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

**1. Kebijakan Pokok**

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

<b>Prioritas Nasional (PN)</b>	<b>Program Prioritas (PP)</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penanggung jawab</b>
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	Ditjen AHU Ditjen PAS
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	Ditjen HAM BPSDM
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkoba	

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
		berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

## 2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<b>Prioritas Nasional I:</b> penguatan	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Peraturan Perundang-</li> </ul>



Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<p>Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw</li> <li>• pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul>	<p>Undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> <li>• Badan Pembinaan Hukum Nasional</li> </ul>
<b>Prioritas Nasional III:</b> peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4)</li> <li>• meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</li> <li>• pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</li> <li>• pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</li> <li>• Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Pemasarakatan</li> <li>• Ditjen Imigrasi</li> <li>• BPSDM Hukum dan HAM</li> </ul>

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
		imigrasi	
<b>Prioritas Nasional IV:</b> pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)</li> </ul>	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> </ul>

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**A. TARGET KINERJA**

**1. TARGET KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN						PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SEKRETARIS JENDERAL</b>								
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian dan HAM	Survey internal	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23	Sekretaris Jenderal
	2. Nilai Reformasi Birokrasi	Penilaian oleh MENPAN RB	85	88	90	92	94	
	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penilaian oleh MENPAN RB	85	88	90	92	94	
<b>KEPALA BIRO PERENCANAAN</b>								
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART).	Jumlah Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART) dibagi jumlah seluruh Satuan Kerja dikali 100%	75%	80%	85%	90%	95%	Kepala Biro Perencanaan
	2. Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	Jumlah satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan RB dibagi jumlah Satuan Kerja dikali 100%	80%	85%	90%	95%	100%	
<b>KEPALA BIRO KEUANGAN</b>								
Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	1. Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah satker yang punya LK sesuai SAP dibagi total satker dikali 100 % = (x-1)	100%	100%	100%	100%	100%	
	2. Persetase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan	95%	96%	97%	98%	99%	

	Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	Anggaran Kementerian di atas 93 dibagi dengan jumlah seluruh satuan kerja x 100%							
<b>KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN</b>									
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	Jumlah pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement dibagi jumlah total pegawai Kementerian x 100%	70%	70%	70%	70%	70%		
<b>KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA</b>									
Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tusi sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	(Jumlah BMN yang digunakan untuk mendukung tusi/jumlah seluruh BMN Kemenkumham) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	(Jumlah nilai temuan tahun (n-1) – n /jumlah nilai temuan n-1) x 100 %	25%	20%	15%	10%	5%		
<b>KEPALA BIRO UMUM</b>									
Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham	1. persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan	Jumlah Satuan Kerja yang puas atas layanan umum internal Kesekjenan dibagi jumlah seluruh Satuan Kerja dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%		Kepala Biro Umum
	2. Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal	Jumlah Satuan Kerja yang puas atas layanan perkantoran dibagi jumlah seluruh Satuan Kerja dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%		
<b>KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN KERJA SAMA</b>									
Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media	Jumlah opini positif pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media dibagi jumlah seluruh berita Kementerian Hukum dan HAM di media x 100%.	75%	80%	85%	90%	95%		Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama
	2. Persentase publikasi Kementerian	Jumlah publikasi Kementerian Hukum	75%	80%	85%	90%	95%		

	Hukum dan HAM yang terintegrasi	dan HAM yang terintegrasi dibagi jumlah publikasi Kementerian Hukum dan HAM x 100%							
<b>KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (PUSDATIN)</b>									
1. Nilai SPBE meningkat	Peningkatan nilai evaluasi SPBE	Nilai (indeks) evaluasi SPBE meningkat dibandingkan tahun sebelumnya	3	3,1	3,2	3,3	3,4	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	
2. Tingkat kepuasan pengguna layanan Teknologi Informasi meningkat.	Indeks kepuasan pengguna layanan Teknologi Informasi	Nilai Hasil survey	3	3,1	3,2	3,3	3,4		
3. Data seluruh Unit kerja terintegrasi	Persentase unit kerja yang datanya terintegrasi pada datawarehouse kementerian	Jumlah unt kerja yang datanya terintegrasi pada datawarehouse Kementerian dibagi jumlah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM x 100%	60%	60%	60%	60%	60%		
4. Seluruh satker menerapkan Teknologi Informasi sesuai standar	Persentase satuan kerja yang menerapkan Teknologi Informasi sesuai standar	Jumlah skor ketaatan pada standar Teknologi Informasi dibagi jumlah unsur yang dinilai x 4 dikali 100%	60%	60%	60%	60%	60%		
<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>									
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Survey Internal	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23		
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah							
		Penilaian WBK/WBBM	75	75	75	75	75	Oleh TPI (Tim Penilai Internal)	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		74	74	74	74	74		
<b>KEPALA DIVISI ADMINISTRASI</b>									
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	Survey Internal	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23		

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM							
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah	23	23	23	23	23	
		Penilaian WBK/WBBM	75	75	75	75	75	Oleh TPI (Tim Penilai Internal)
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		74	74	74	74	74	
<b>KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</b>								
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome	Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome dibagi Jumlah Satuan Kerja Kantor Wilayah dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome	Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome dibagi Jumlah Satuan Kerja Kantor Wilayah dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di wilayah	Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di media	Jumlah Berita Positif Yang di Publikasikan dibagi dengan Jumlah Seluruh Berita yang terpublikasikan dikali 100%	75%	80%	85%	90%	95%	
	Persentase berita yang dipublikasikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi	Jumlah berita Satuan Kerja yang terintegrasi dengan website Kantor Wilayah dibagi dengan Jumlah Berita yang dipublikasi Satuan Kerja dikali	75%	80%	85%	90%	95%	

		100%						
KEPALA BAGIAN UMUM								
Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Evaluasi Kepatuhan Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Nilai indeks evaluasi kepatuhan pengelolaan TI	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	
Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pegawai yang puas atas layanan umum internal Kantor Wilayah dibagi seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pegawai yang puas atas layanan perkantoran Kantor Wilayah dibagi seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks layanan kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Nilai Indeks layanan kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	
Terwujudnya Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	Jumlah satuan kerja yang mempunyai laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dibagi dengan jumlah seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah yang mendapatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di atas 93	Jumlah Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah yang mendapatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di atas 93 dibagi dengan jumlah Satuan Kerja yang ada di Kantor Wilayah dikali 100%	95%	96%	97%	98%	99%	

Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tusi sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah BMN yang digunakan untuk mendukung tusi sesuai ketentuan dibagi Jumlah Total BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	
---	--	--	------	------	------	------	------	--

## 2. TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

SASARAN STRATEGIS KEMENKUMHAM	SASARAN PROGRAM PEMASYARAKATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>Memastikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik</b>	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan	77,5 %	79% 78,1%	80%	81%	82%	83%
<b>Memastikan Penegakan Hukum yang Mampu menjadi Pendorong Inovasi dan kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional</b>	Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil dan bersertifikat	27,96 %	35%	40%	45%	50%	55%
<b>Ikut Berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI</b>	Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	0,92 %	1%	1%	1%	1%	1%



<b>Meningkatkan kesadaran hukum dan Pemajuan HAM bagi masyarakat dan aparatur</b>	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	<b>48,8 %</b>	55%	60%	65%	70%	75%
---	--------------------------------	---	---------------	-----	-----	-----	-----	-----

### 3. TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Banten	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Banten	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	DIVIM
			Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Banten	3,10	3,11	3,12	3,13	3,14	
			Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Banten	3,10	3,11	3,12	3,13	3,14	

### 4. TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					KETERANGAN
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>								
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Jumlah PNBP tahun berjalan dikurangi jumlah PNBP tahun sebelumnya dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya dikali 100%	5%	5%	5%	5%	5%	

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang diterima dikali 100%	80%	82%	84%	86%	88%	Aduan dianggap sudah selesai ditangani apabila Kanwil / Majelis Pengawas Notaris sudah mengeluarkan surat resmi berupa rekomendasi / tindak lanjut atas aduan yang ditangani kepada pihak-pihak yang terkait / berwenang
Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Jumlah permohonan layanan yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan yang diterima dikali 100%	80%	82%	84%	86%	88%	Indikator khusus bagi kanwil yang di wilayahnya terdapat BHP (DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan)
<b>KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>								
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Jumlah PNBP tahun berjalan dikurangi jumlah PNBP tahun sebelumnya dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya dikali 100%	5%	5%	5%	5%	5%	<i>idem</i>
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang diterima dikali 100%	80%	82%	84%	86%	88%	<i>idem</i>
Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Jumlah permohonan layanan yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan yang diterima dikali 100%	80%	82%	84%	86%	88%	<i>idem</i>

<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM</b>									
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Jumlah PNBP tahun berjalan dikurangi jumlah PNBP tahun sebelumnya dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya dikali 100%	5%	5%	5%	5%	5%		<i>idem</i>
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang diterima dikali 100%	80%	82%	84%	86%	88%		<i>idem</i>
<b>KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM</b>									
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Jumlah PNBP tahun berjalan dikurangi jumlah PNBP tahun sebelumnya dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya dikali 100%	5%	5%	5%	5%	5%		<i>idem</i>
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang diterima dikali 100%	80%	82%	84%	86%	88%		<i>idem</i>
<b>KETUA BHP</b>									
Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Jumlah permohonan layanan yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan yang diterima dikali 100%	80%	82%	84%	86%	88%		<i>idem</i>

## 5. TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>								
1. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah pemetaan potensi penerimaan permohonan kekayaan intelektual pada provinsi	jumlah : Perhitungan berdasarkan jumlah permohonan kekayaan intelektual yang difasilitasi teradministrasi melalui online pada Provinsi tersebut.	4389	4608	4839	5081	5335	Idem
	2. jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan diseminasi/promosi terkait kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	990	10440	1091	1146	1203	Idem
2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	1. jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	66	66	99	99	99	Idem
<b>KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>								
1. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah pemetaan potensi penerimaan permohonan kekayaan intelektual pada provinsi	jumlah : Perhitungan berdasarkan jumlah permohonan kekayaan intelektual yang difasilitasi teradministrasi melalui online pada Provinsi tersebut.	4389	4608	4839	5081	5335	Idem
	2. jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan diseminasi/promosi terkait kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	990	10440	1091	1146	1203	Idem

2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	1. jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	66	66	99	99	99	Idem
<b>KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM</b>								
1. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah pemetaan potensi penerimaan permohonan kekayaan intelektual pada provinsi	jumlah : Perhitungan berdasarkan jumlah permohonan kekayaan intelektual yang difasilitasi teradministrasi melalui online pada Provinsi tersebut.	4389	4608	4839	5081	5335	Idem
	2. jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan diseminasi/promosi terkait kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	990	10440	1091	1146	1203	Idem
2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	1. jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	66	66	99	99	99	Idem
<b>KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>								
1. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah pemetaan potensi penerimaan permohonan kekayaan intelektual pada provinsi	jumlah : Perhitungan berdasarkan jumlah permohonan kekayaan intelektual yang difasilitasi teradministrasi melalui online pada Provinsi tersebut.	4389	4608	4839	5081	5335	Idem
	2. jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan diseminasi/promosi terkait kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	990	10440	1091	1146	1203	Idem

2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	1. jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	66	66	99	99	99	Idem
---	---	--	----	----	----	----	----	------

## 6. TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>								
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	jumlah raperda yang selesai diharmonisasikan/jumlah permohonan harmonisasi raperda x 100%	80%	80%	80%	80%	80%	
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	602	667	667	667	667	
<b>KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>								
1. pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah	persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	jumlah raperda yang selesai diharmonisasikan/jumlah permohonan harmonisasi raperda x 100%	80%	80%	80%	80%	80%	
2. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	602	667	667	667	667	
<b>KEPALA BIDANG HUKUM</b>								

1. pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah	persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	jumlah raperda yang selesai diharmonisasikan/jumlah permohonan harmonisasi raperda x 100%	80%	80%	80%	80%	80%	
2. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	602	667	667	667	667	
<b>KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH</b>								
1. pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah	persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	jumlah raperda yang selesai diharmonisasikan/jumlah permohonan harmonisasi raperda x 100%	80%	80%	80%	80%	80%	
2. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	602	667	667	667	667	

## 7. TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL

(Kanwil Banten)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>								
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dalam perkara perdata, pidana dan TUN	177 Orang	177 Orang	181 Orang	181 Orang	181 Orang	

	2. Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin berupa penyuluhan, konsultasi, investigasi, penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar peradilan, dan drafting dokumen hukum	23 Kegiatan	23 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	n/a	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	
	4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Jumlah penyuluhan hukum di 33 kantor wilayah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
	5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Jumlah perencanaan pembentukan produk hukum di 33 kantor wilayah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
	6. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum	n/a	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	
<b>KEPALA BIDANG HUKUM</b>								
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dalam perkara perdata, pidana dan TUN	177 Orang	177 Orang	181 Orang	181 Orang	181 Orang	



	2. Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin berupa penyuluhan, konsultasi, investigasi, penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar peradilan, dan drafting dokumen hukum	23 Kegiatan	23 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	n/a	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	
	4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Jumlah penyuluhan hukum di 33 kantor wilayah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
	5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Jumlah perencanaan pembentukan produk hukum di 33 kantor wilayah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
	6. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum	n/a	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	
<b>KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH</b>								
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	1. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Jumlah perencanaan pembentukan produk hukum di 33 kantor wilayah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
<b>KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, DAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM</b>								
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dalam perkara perdata, pidana dan TUN	177 Orang	177 Orang	181 Orang	181 Orang	181 Orang	

	2. Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin berupa penyuluhan, konsultasi, investigasi, penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar peradilan, dan drafting dokumen hukum	23 Kegiatan	23 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	n/a	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	
	4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Jumlah penyuluhan hukum di 33 kantor wilayah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
	5. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum	n/a	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	

## 8. TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN						PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Perhitungan berdasarkan Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	-	3	3	3	3	Kepala Kantor Wilayah
	jumlah kab/kota peduli HAM	Perhitungan berdasarkan jumlah kab/kota peduli HAM	-	1	1	1	1	

## 9. TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BALITBANG HUKUM DAN HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN						PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Perhitungan berdasarkan jumlah Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	70%	80%	80%	80%	Kepala Kantor Wilayah
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Perhitungan berdasarkan jumlah Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	

## B. KERANGKA PENDANAAN

### 1. KERANGKA PENDANAAN SEKRETARIAT JENDERAL

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>											
<b>KANWIL BANTEN</b>											
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien						11.606.940 .735.000	19.666.842 .900.000	20.428.218 .504.000	21.382.204 .874.000	
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					Sekretariat

											Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					Sekretariat Jenderal
SP1A 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah					11.465.862 .662.000	19.474.145 .496.000	20.220.605 .925.000	21.158.342 .700.000	Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
1558. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM											
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Daerah					15.531.727 .000	21.079.731 .000	20.796.422 .000	21.836.233 .000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah		3,1	3,1	3,1	3,1					

## 2. KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Daerah	1.126.980.000	1.179.385.000	1.238.346.000	1.300.339.000	Kepala Divisi Pemasarakatan
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah						

### 3. KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Banten	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Banten						DIVIM
			Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Banten	29.380.876.000	42.425.156.880	44.546.414.724	46.773.735.460	49.112.422.233	
			Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Banten						

### 4. KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	RM		PNBP		TOTAL
			BLJ PEGAWAI	BLJ BARANG OPS	BLJ BARANG NON OPS	BLJ MODAL	
1	648990	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	0	0	2.568.000	0	2.568.000

### 5. KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	

1	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah						Kepala Kantor Wilayah
			Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	-	651.275.00 0	658.507.00 0	666.364.00 0	674.867.00 0	
		Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual						
			Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	-	279.640.00 0	301.658.00 0	324.217.00 0	347.359.00 0	
			Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah						

## 6. KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

URAIAN	TA 2020			TA 2021			TA 2022			TA 2023			TA 2024		
	Anggaran	Targ et	Satuan	Anggaran	Target	Satua n	Anggara n	Tar get	Satua n	Anggara n	Tar get	Satua n	Anggara n	Tar get	Satua n
5250. Penyelengg aran Fasilitasi Pembentuk an Hukum di Wilayah	5.211.324.0 00		Raperda	7.800.558.0 00		Raper da	8.190.585 .900		Raper da	8.600.115 .195		Raper da	9.030.120 .955		Raper da
5250.001. Fasilitasi Pembentuk an Produk Hukum daerah	1.379.365.0 00	212	Raperda	1.996.063.0 00	212	Raper da	2.095.866 .150	212	Raper da	2.200.659 .458	212	Raper da	2.310.692 .430	212	Raper da
BANTEN	142.158.00 0	30	Raperda	179.753.00 0	30	Raper da	188.740.6 50	30	Raper da	198.177.6 83	30	Raper da	208.086.5 67	30	Raper da
5250.002. Pembinaan Perancang peraturan Perundang -undangan di daerah	866.969.00 0	268	Orang	1.185.156.0 00	318	Oran g	1.244.413 .800	318	Oran g	1.306.634 .490	318	Oran g	1.371.966 .215	318	Oran g
BANTEN	25.220.000	12	Orang	22.490.000	12	Oran g	23.614.50 0	12	Oran g	24.795.22 5	12	Oran g	26.034.98 6	12	Oran g

## 7. KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL (Kanwil Banten)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	KERANGKA PENDANAAN					PENAN GGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	

KEPALA KANTOR WILAYAH								
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dalam perkara perdata, pidana dan TUN	1.416.000	1.416.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000	
	2. Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin berupa penyuluhan, konsultasi, investigasi, penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar peradilan, dan drafting dokumen hukum	245.410	245.410	256.080	256.080	256.080	
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	107.052	110.263,56	113.571,47	116.978,61	120.487,97	
	4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Jumlah penyuluhan hukum di 33 kantor wilayah	155.000	159.650,00	164.439,50	169.372,69	174.453,87	
	5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Jumlah perencanaan pembentukan produk hukum di 33 kantor wilayah	85.193	87.748,79	90.381,25	93.092,69	95.885,47	
	6. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum	85.193	87.748,79	90.381,25	93.092,69	95.885,47	
KEPALA BIDANG HUKUM								
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dalam perkara perdata, pidana dan TUN	1.416.000	1.416.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000	



	2. Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin berupa penyuluhan, konsultasi, investigasi, penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar peradilan, dan drafting dokumen hukum	245.410	245.410	256.080	256.080	256.080	
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	107.052	110.263,56	113.571,47	116.978,61	120.487,97	
	4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Jumlah penyuluhan hukum di 33 kantor wilayah	155.000	159.650,00	164.439,50	169.372,69	174.453,87	
	5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Jumlah perencanaan pembentukan produk hukum di 33 kantor wilayah	85.193	87.748,79	90.381,25	93.092,69	95.885,47	
	6. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum	85.193	87.748,79	90.381,25	93.092,69	95.885,47	
<b>KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH</b>								
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	1. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Jumlah perencanaan pembentukan produk hukum di 33 kantor wilayah	85.193	87.748,79	90.381,25	93.092,69	95.885,47	
<b>KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, DAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM</b>								
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dalam perkara perdata, pidana dan TUN	1.416.000	1.416.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000	

	2. Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin berupa penyuluhan, konsultasi, investigasi, penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum	245.410	245.410	256.080	256.080	256.080	
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	107.052	110.263,5 6	113.571,4 7	116.978,6 1	120.487,9 7	
	4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Jumlah penyuluhan hukum di 33 kantor wilayah	155.000	159.650,0 0	164.439,5 0	169.372,6 9	174.453,8 7	
	5. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum	85.193	87.748,79	90.381,25	93.092,69	95.885,47	

## 8. KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>DITJEN HAM</b>											
							Rp233.527	Rp245.836	Rp270.420	Rp297.462	
SS 2	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM										
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target		65%	70%	75%	80%					Ditjen HAM
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota		35%	40%	45%	50%					

	memenuhi HAM.										
SP4	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM										Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
	Persentase Kab/Kota Peduli HAM		15%	20%	25%	30%					
	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		50%	50%	50%	50%					
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM		75%	75%	75%	100%					
5255 - Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah											
SK 10	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Daerah					Rp113.457	Rp125.766	Rp138.343	Rp152.177	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		109 Instansi Pemerintah	109 Instansi Pemerintah	109 Instansi Pemerintah	109 Instansi Pemerintah					
			3	3	3	3	Rp37.819	Rp41.922	Rp46.114	Rp50.726	
	KANWIL BANTEN		3	3	3	3	Rp37.819	Rp41.922	Rp46.114	Rp50.726	
	jumlah kab/kota peduli HAM		57 Instansi Pemerintah	57 Instansi Pemerintah	57 Instansi Pemerintah	57 Instansi Pemerintah					
			1	1	1	1	Rp37.819	Rp41.922	Rp46.114	Rp50.726	
	KANWIL BANTEN		1	1	1	1	Rp37.819	Rp41.922	Rp46.114	Rp50.726	
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		33 Instansi Pemerintah	33 Instansi Pemerintah	33 Instansi Pemerintah	33 Instansi Pemerintah					

			1	1	1	1	Rp37.819	Rp41.922	Rp46.114	Rp50.726	
	KANWIL BANTEN		1	1	1	1	Rp37.819	Rp41.922	Rp46.114	Rp50.726	
SK 11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Daerah					Rp120.070	Rp120.070	Rp132.077	Rp145.285	Kepala Kantor Wilayah
	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		99 Rekomendasi	99 Rekomendasi	99 Rekomendasi	99 Rekomendasi					
			3	3	3	3	Rp120.070	Rp120.070	Rp132.077	Rp145.285	
	KANWIL BANTEN		3	3	3	3	Rp120.070	Rp120.070	Rp132.077	Rp145.285	

## 9. KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL BALITBANG HUKUM DAN HAM

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<b>KANWIL BANTEN</b>										
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah											
SK 8	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Daerah									Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		70%	80%	80%	80%	173.350	173.350	185.697	192.196	
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	26.078	26.078	27.935	28.913	